

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis air bersih merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Di tingkat kabupaten, Bondowoso tercatat beberapa kali mengalami kekeringan berkepanjangan. Pada tahun 2024 tercatat 19 desa yang mengalami kekeringan. Kondisi ini menunjukkan bahwa krisis air ini bukan sekedar persoalan musiman tetapi persoalan struktural yang memerlukan penanganan lintas sektor (*SK Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan 2025.Pdf*, n.d.). Salah satu desa yang terdampak kekeringan yaitu Desa Purnama di Kecamatan Tegalmepel. Sejak 2023 warga mengalami kekeringan berkepanjangan akibat letak geografis desa yang berada di daerah perbukitan, sehingga sulit mendapatkan aliran air secara gravitasi dari sumber utama. Akibatnya, pemerintah daerah bersama BPBD beberapa kali melakukan distribusi air hingga mencapai 20.000 liter air untuk memenuhi kebutuhan warga (Bahri, 2023). Fenomena ini memperlihatkan bahwa penanganan krisis air bersih memerlukan strategi yang tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga perencanaan jangka panjang yang melibatkan berbagai pihak.

Keterbatasan air bersih berdampak langsung terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Masyarakat desa purnama hanya mengandalkan hewan ternak dalam mata pencahariannya dikarenakan sulitnya ketersediaan air. Pada musim kemarau, sebagian warga harus berjalan jauh untuk mengambil air ke sumber mata air di desa sebelah atau menunggu distribusi dari truk tangki bantuan pemerintah daerah (Widharsa, 2023). Setiap rumah di Desa Purnama memiliki tempat penampungan air masing – masing. Aktivitas rumah tangga, pertanian, dan pendidikan ikut terganggu karena pasokan air tidak menentu. Ketika pasokan air datang, masyarakat berebut untuk mendapatkan bagian karena jumlahnya tidak sebanding dengan kebutuhan seluruh warga. Kondisi ini memperlihatkan bahwa air bersih bukan hanya kebutuhan fisik, tetapi juga menjadi faktor sosial ekonomi yang menentukan kualitas hidup masyarakat desa.

Salah satu langkah nyata dalam mengatasi krisis air bersih tersebut, pemerintah Desa Purnama membuat program pipanisasi (Rasyidi, 2023). Program pipanisasi yaitu kegiatan pemasangan pipa yang menyalurkan air dari sumber mata air ke pemukiman warga untuk mengurangi jarak ambil air dan ketergantungan pada distribusi darurat. Program ini penting karena mampu memperluas jangkauan layanan air bersih secara cepat tanpa menunggu proyek besar pemerintah daerah. Di Desa Purnama pelaksanaan program pipanisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, masyarakat, BPBD, dan BMH (Baitul Maal Hidayatullah) menunjukkan respon cepat terhadap masalah krisis air bersih. Namun, keberhasilan program pipanisasi di tingkat desa juga membutuhkan dukungan institusional, pendanaan, dan partisipasi masyarakat agar jaringan terpelihara dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan layanan air bersih. Program pipanisasi ini merupakan bukti nyata adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi persoalan air di tingkat lokal.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyediakan air bersih, ternyata masih terdapat masalah dalam hal distribusi dan pemenuhan kebutuhan teknis di Bondowoso. Di Desa Purnama mengalami kesulitan untuk mengisi timba air berukuran 5 liter yang memerlukan waktu sekitar 30 menit hal ini dikarenakan pipa berdiameter kecil dan aliran air yang sangat kecil (Widharsa, 2023). Selain itu, belum semua wilayah desa terjangkau aliran air karena tekanan air tidak mampu mencapai titik tertinggi.. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan krisis air bersih masih membutuhkan perencanaan yang lebih matang dan kolaborasi yang lebih luas antar pihak terkait. Selain itu, mekanisme distribusi darurat yang bersifat temporer, seperti pengiriman truk tangki air, tidak menyelesaikan akar masalah jaringan dan infrastruktur. Oleh karena itu, aspek teknis harus diintegrasikan dengan manajemen yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Selain itu, keterbatasan pendanaan juga menjadi masalah tersendiri. Program pipanisasi sebagian besar dibiayai melalui dana desa dan donasi lembaga sosial, sehingga tidak selalu mencukupi untuk perluasan jaringan. Setelah tahap awal pembangunan selesai tidak ada lagi dukungan dana untuk pemeliharaan jaringan pipa. Pemerintah desa dengan anggaran terbatas tidak mampu menanggung seluruh

biaya perawatan. Akibatnya, sebagian pipa rusak jaringan distribusi air tidak lagi berfungsi optimal. Pemerintah daerah memang telah menetapkan kebijakan tanggap darurat kekeringan, namun implementasinya masih berfokus pada distribusi air sementara, bukan penguatan infrastruktur permanen (*SK Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan 2025.Pdf*, n.d.). Sedangkan, kolaborasi lintas aktor menjadi kunci untuk membangun sistem air bersih yang berkelanjutan.

Permasalahan krisis air tidak hanya teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan tata kelola yang efektif di tingkat desa. Kolaborasi antara pemerintah desa, BPBD, masyarakat, dan lembaga sosial masih belum terstruktur secara sinergis. Koordinasi dan pembagian peran yang belum jelas menyebabkan lemahnya keberlanjutan pengelolaan air bersih (Rifandini, 2022). Jika kolaborasi ini gagal, maka program air bersih berisiko kembali tergantung pada bantuan sementara. Oleh karena itu, pendekatan tata kelola kolaboratif menjadi penting sebagai strategi untuk membangun sinergi antaraktor dalam mengelola air bersih secara berkelanjutan.

Di tengah keterbatasan itu, warga masih menunjukkan semangat kerja sama dalam menangani permasalahan air bersih, tetapi semangat tersebut menurun karena tidak ada kepastian dukungan dari pemerintah maupun lembaga sosial. Beberapa warga berinisiatif memperbaiki pipa yang bocor secara mandiri, namun upaya itu tidak cukup untuk memulihkan sistem secara menyeluruh. Situasi ini menggambarkan lemahnya sistem pengelolaan air yang belum berkelanjutan. Partisipasi masyarakat yang tidak didukung institusi dan dana yang memadai akan sulit mempertahankan kinerja (Zendatro et al., 2024). Akibatnya, kolaborasi hanya aktif pada tahap awal proyek, kemudian berhenti ketika dana bantuan tidak lagi tersedia.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pendekatan tata kelola kolaboratif menjadi penting untuk menjamin keberlanjutan program pipanisasi. Hal ini penting karena program pipanisasi bukan hanya soal pemasangan pipa, melainkan juga soal pembagian tanggung jawab, pendanaan, dan penerimaan sosial di tingkat desa. Dalam perspektif tata kelola kolaboratif, pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta berperan sebagai mitra yang saling bergantung untuk mencapai tujuan bersama

(Kusumah & Mustofa, 2020). Dengan tata kelola yang baik, program pipanisasi tidak hanya sukses secara teknis tetapi juga dapat berjalan secara kelembagaan. Oleh karena itu, kolaborasi yang efektif merupakan kunci dalam membangun sistem air bersih yang tahan terhadap berbagai perubahan

Sejumlah penelitian terdahulu mengenai pengelolaan air bersih di Indonesia telah menyoroti pentingnya mekanisme kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas layanan air bersih. Namun, mayoritas studi tersebut berfokus pada wilayah perkotaan dengan basis PDAM atau pada program berskala besar seperti PAMSIMAS, sehingga dinamika tata kelola kolaboratif di wilayah pedesaan masih belum banyak diteliti. Selain itu, sebagian besar penelitian hanya menilai efektivitas program dari sisi teknis, seperti infrastruktur, akses fisik, dan kapasitas pembiayaan, tanpa menggali secara mendalam proses interaksi antar aktor, koordinasi, relasi kekuasaan, dan mekanisme kolaborasi sosial yang terjadi di tingkat lokal. Lebih jauh, belum ditemukan kajian yang secara spesifik mengulas bagaimana tata kelola kolaboratif dibangun, dijalankan, dan dipertahankan dalam konteks penanggulangan krisis air bersih di Desa Purnama, Kecamatan Tegal Ampel, Kabupaten Bondowoso. Dengan demikian, terdapat celah penelitian berupa kebutuhan untuk mengeksplorasi praktik kolaborasi multi-aktor dalam pengelolaan air bersih di desa, baik dari sisi proses, dinamika, maupun tantangannya, agar dapat menemukan model kolaborasi yang sesuai dengan konteks sosial dan kelembagaan masyarakat pedesaan.

Dengan demikian, penelitian ini mengambil judul Tata Kelola Kolaboratif Program Penanggulangan Krisis Air Bersih di Desa Purnama , Kecamatan Tegal Ampel, Kabupaten Bondowoso dengan metode pendekatan kualitatif dan penyusunan secara induktif. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memahami bagaimana tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan krisis air bersih benar-benar berlangsung di tingkat desa, khususnya di Desa Purnama yang menghadapi keterbatasan sumber daya, minimnya infrastruktur, dan kebutuhan koordinasi lintas aktor. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang tidak hanya menilai keberhasilan program dari aspek teknis seperti akses dan

infrastruktur, tetapi juga mengupas secara mendalam dinamika hubungan antaraktor, proses negosiasi, bentuk partisipasi masyarakat, serta mekanisme kolaborasi yang terbentuk dalam konteks sosial pedesaan. Selain itu, penelitian ini secara spesifik menggunakan Model *Collaborative Governance Regime* (CGR) untuk memetakan bagaimana kolaborasi dibangun, dipertahankan, dan dijalankan dalam upaya mengatasi krisis air bersih, sehingga memberikan perspektif baru yang belum banyak diangkat dalam studi-studi terdahulu. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya menjembatani kekurangan literatur, tetapi juga menghasilkan rekomendasi yang relevan bagi pemerintah desa, lembaga mitra, dan masyarakat dalam menciptakan tata kelola air bersih yang lebih efektif dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana tata kelola kolaboratif diterapkan dalam program penanggulangan krisis air bersih serta peran dan kontribusi antar aktor dalam mewujudkan pengelolaan air bersih berkelanjutan di Desa Purnama ?

1.3 Tujuan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tata kelola kolaboratif dalam program penanggulangan krisis air bersih di Desa Purnama, Kecamatan Tegal Ampel, Kabupaten Bondowoso, serta mengidentifikasi peran dan kontribusi masing-masing aktor yang terlibat dalam mewujudkan pengelolaan air bersih yang berkelanjutan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya kajian mengenai teori tata kelola kolaboratif, khususnya pada konteks penanggulangan krisis air bersih di tingkat desa. Melalui penerapan Model *Collaborative Governance Regime* (CGR) dari Emerson, Nabatchi, dan Balogh, penelitian ini menunjukkan bagaimana tiga dimensi utama *principled engagement*, *shared motivation*, dan *capacity for joint action* dapat saling bekerja membentuk sebuah proses kolaborasi yang utuh dalam menghadapi persoalan publik. Temuan

penelitian memberikan gambaran empiris yang dapat memperluas pemahaman teori, terutama tentang bagaimana hubungan antaraktor pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat terbentuk, dipelihara, serta berpengaruh terhadap keberhasilan program air bersih.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penanggulangan krisis air bersih di Desa Purnama. Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi mekanisme koordinasi, pembagian peran, serta efektivitas kebijakan yang selama ini diterapkan dalam pengelolaan sumber daya air. Bagi BPBD dan lembaga swasta seperti BMH, penelitian ini memberikan gambaran mengenai pentingnya dukungan teknis, logistik, dan pendanaan yang terarah agar program dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan rekomendasi mengenai bagaimana masyarakat dapat lebih diberdayakan dalam pemeliharaan infrastruktur air bersih, sehingga keberlanjutan program dapat terjaga. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memperbaiki tata kelola kolaborasi yang sedang berjalan, tetapi juga dapat menjadi rujukan bagi pengembangan program serupa di wilayah lain yang mengalami permasalahan kebutuhan air bersih.